

**PERAN RUTGERS WPF DALAM MENANGANI KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA MELALUI
PROGRAM “PREVENTION+” TAHUN 2016-2020**

**Oleh : Nachadika Shania Maera Putri
Pembimbing: Saiman Pakpahan, S.IP., M.Si.**

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Cases of violence against women in Indonesia tend to increase every year, despite various efforts from the government. For this reason, Rutgers World Population Foundation (WPF) is taking part in addressing the issue of violence against women in Indonesia through the Prevention+ Program implemented in Jakarta, Lampung, Yogyakarta, and Solo by embracing women and involving men as agents of change.

This research uses qualitative methods and data collection techniques from literature studies originating from books, journals, official reports, news articles, and official publications relating to the topic discussed. The pluralism perspective and theory of Non-Governmental Organizations (NGOs) put forward by Nazneen Kanji and David Lewis are used to analyze the role of Rutgers WPF in the Prevention+ Program in Indonesia, with three role classification indicators, namely as implementer, catalyst, and partner.

The results of this study indicate that through the Prevention+ Program, Rutgers WPF has fulfilled the three indicators of the role of NGOs proposed by Nazneen Kanji and David Lewis. This role has had positive influence on the progress of handling violence against women in Indonesia, despite facing several challenges in its implementation.

Keywords: *Rutgers WPF, roles, Non-Governmental Organizations, Violence against Women, Agent of Change, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan latar belakang masyarakat yang erat dengan nilai patriarki yang dapat dilihat dari tingginya ketimpangan gender di kehidupan masyarakatnya. Berdasarkan The Global Gender Gap Report, peringkat tertinggi Indonesia dalam konteks kesetaraan gender berada pada urutan ke 84 dari 144 negara pada tahun 2017 dan peringkat terendah yaitu urutan ke 101 dari

156 negara.¹ Nilai-nilai adat serta budaya yang ada di masyarakat dan kesalahan penafsiran pada ajaran agama menjadi salah satu faktor pendukung langgengnya nilai patriarki di masyarakat Indonesia.²

¹ Country Economy, "Indonesia - Global Gender Gap Index," Country Economy, diakses pada 11 Maret 2023, <https://countryeconomy.com/demography/global-gender-gap-index/indonesia>

² Indra P. Nugroho, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Budaya Patriarki Di Masyarakat Indonesia," Badan Riset dan Inovasi Nasional,

Hal ini berdampak pada respon masyarakat terhadap kekerasan, pelayanan terhadap kekerasan, dan pembuatan kebijakan yang menormalisasi kekerasan terhadap perempuan.³

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2015 terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan laporan yang sangat tinggi terjadi pada rentang tahun 2011 hingga tahun 2012, yaitu sebanyak 35% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebesar 9% dari tahun 2014 dengan jumlah 321.752 kasus.⁴ Kekerasan yang dilaporkan terjadi di ranah domestik dalam bentuk psikis, ekonomi, fisik dan seksual. Sementara itu, kekerasan yang terjadi di ranah komunitas berupa kekerasan seksual, fisik, psikis, ekonomi dan kekerasan lainnya.⁵ Kasus ini merupakan fenomena gunung es, dimana yang terlihat tidak merepresentasikan data keseluruhan karena tidak semuanya dilaporkan dan memiliki bukti yang cukup.⁶ Dengan begitu, kasus yang terjadi kenyataannya dapat melebihi data yang tercatat.

Hingga tahun 2014, terdapat 252 kebijakan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan di tingkat

diakses pada 4 Juni 2023,
<https://pmb.brin.go.id/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-budaya-patriarki-di-masyarakat-indonesia/>

³ *Ibid.*

⁴ Komnas Perempuan, "CATAHU 2017: Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016," Komnas Perempuan, diakses pada 6 Juni 2023 melalui https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4980&keywords=catahu+2017.

⁵ *Ibid.*

⁶ Devi Asmarani, "93 Persen Penyintas Tak Laporkan Pemerkosaan Yang Dialami: Survei," *Magdalene*, diakses pada 22 Agustus 2021, <https://magdalene.co/story/93-persen-penyintas-tak-laporkan-pemerkosaan-yang-dialami-survei>.

nasional dan daerah dan terus bertambah setiap tahunnya.⁷ Meskipun begitu, usaha-usaha tersebut belum efektif dengan terus meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya. Hal ini telah menyita perhatian International Non-Governmental Organization (INGO) dari Belanda yang berfokus kepada kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, seperti hak dan kesehatan reproduksi dan seksual, kekerasan seksual dan KBG lainnya yang bernama Rutgers WPF. Di Indonesia, Rutgers WPF telah beroperasi sejak tahun 1997.⁸

Eratnya budaya patriarki dalam norma masyarakat serta minimnya program penanganan kekerasan terhadap perempuan yang menysar kepada akar persoalan yang terdapat partisipasi laki-laki menjadi pendorong Rutgers WPF untuk meluncurkan Program Prevention+ di Indonesia.⁹ Di Indonesia, Prevention+ merupakan program pertama yang mengikutsertakan peran laki-laki sebagai *agent of change* untuk mengurangi dan mencegah kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi terhadap perempuan, tentunya dengan mengedepankan nilai-nilai maskulinitas positif berlandaskan nilai-nilai kesetaraan dan anti-kekerasan. Program ini juga turut mengikutsertakan para perempuan dan anak perempuan, yang rentan menjadi korban dalam permasalahan ini.¹⁰

Program Prevention+ menysar kepada empat sasaran strategis; yaitu individu, komunitas, institusional dan pemerintah yang terlaksana di empat wilayah strategis yaitu Jakarta, Lampung,

⁷ Neng D. Affiah, *Rekam Juang Komnas Perempuan: 16 Tahun Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014), hal. 1-20.

⁸ Rutgers WPF Indonesia, "Siapa Kami," Rutgers WPF Indonesia, diakses pada 26 Agustus 2021, <https://rutgers.id/tentang-kami/siapa-kami/>.

⁹ Rutgers WPF Indonesia, "Prevention+," Rutgers WPF Indonesia, diakses pada 26 Agustus 2021 <https://rutgers.id/program/prevention/>.

¹⁰ *Ibid.*

Yogyakarta dan Solo.¹¹ Keempat wilayah tersebut merupakan perkotaan besar di Indonesia yang mana Lampung, Yogyakarta dan Solo adalah kota besar dengan masyarakat yang erat oleh norma patriarki, serta Jakarta sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat lokasi advokasi Rutgers WPF ke tingkat pemerintah dan institusi negara.

KERANGKA TEORI

Perspektif Pluralisme

Penelitian ini menggunakan Perspektif Pluralisme untuk menganalisis peran Rutgers WPF dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Pluralisme memiliki empat asumsi dasar, yaitu:¹²

- a. Aktor non-negara dapat memegang peranan penting dalam hubungan internasional. Aktor non-negara dianggap aktor mandiri karena memiliki struktur dan bagian yang dapat mempengaruhi kebijakan aktor negara.
- b. Negara bukan aktor tunggal dalam hubungan internasional, karena memiliki individu dan kelompok-kelompok yang mampu mempengaruhi kebijakan.
- c. Negara bukan aktor rasional, karena kebijakan luar negerinya dibentuk melalui proses sosial seperti perselisihan, tawar-menawar, dan kompromi antar berbagai pihak.
- d. Agenda politik internasional sangat luas. Para aktor internasional tidak lagi hanya membicarakan tentang *power*, militer, dan keamanan

¹¹ Rutgers, Sonke Gender Justice, and Promundo, *Annual Report 2016 Prevention+: Men and Women Ending Gender-Based Violence*, (Utrecht, 2016), <https://aidstream.org/files/documents/Prevention-Plus-Annual-Report-2016-FINAL-20170501070516.pdf>.

¹² M. Saeri, "Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik," *Jurnal Transnasional* 3, no. 2 (Februari 2012): hal. 16, <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/viewFile/70/64>.

namun juga didominasi oleh isu sosial dan ekonomi.

Teori Non-Governmental Organization (NGO)

Menurut Lewis dan Kanji, NGO adalah lembaga yang beroperasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan atau bantuan kemanusiaan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi di tingkat lokal, nasional dan internasional. Hal ini menjadikan INGO sebagai aktor penting yang berpengaruh dalam pembangunan internasional dengan berbagai aksinya yang menjadi penyedia layanan bagi individu serta kelompok rentan dan termarginalkan, maupun advokat yang membantu menyuarakan aspirasi dan mempromosikan kebijakan tertentu.¹³ Kontribusi tersebut membuat INGO dapat dikatakan sebagai salah satu agen pembangunan atau *Agent of Aid*, khususnya apabila negara tidak mampu untuk mengatasi keluhan yang ada di masyarakat. Sebagai *Agent of Aid*, terdapat tiga peranan INGO berdasarkan peran NGO, yaitu:¹⁴

- a. Sebagai pelaksana (*implementer*), dimana NGO dapat memobilisasi sumber daya berbentuk barang dan jasa kepada individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan atau termarginalkan.
- b. Sebagai katalis (*catalyst*), NGO berperan sebagai pembawa perubahan yang mampu menginspirasi, memfasilitasi dan berkontribusi terhadap kemajuan pemikiran dan aksi yang lebih baik dari individu, kelompok atau komunitas, pemerintah, bisnis dan donatur.
- c. Sebagai mitra (*partner*), NGO bekerja sama dengan aktor lainnya seperti pemerintah, donatur dan pihak-pihak

¹³ David Lewis dan Nazneen Kanji, *Non-Governmental Organizations and Development* (London: Routledge, 2009), hal. 1-2.

¹⁴ David Lewis dan Nazneen Kanji, *Op. Cit.*, hal. 12-92.

swasta. Hal ini diperlukan untuk efisiensi pemanfaatan sumber daya yang langka, memperkuat dan mengembangkan kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kualitas interaksi NGO sehingga dapat mempermudah jalannya usaha untuk mencapai tujuannya.

INGO bersifat dinamis dan tidak dapat diprediksi.¹⁵ Kegiatan sebuah INGO yang dinamis dan tidak terbatas oleh satu kategori peran dipengaruhi oleh hubungan organisasi dengan aktor pembangunan lainnya seperti negara atau pemerintah, donatur, serta konteks sejarah dan budaya tertentu yang ada.¹⁶

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif, yaitu jenis penelitian yang data-data dan temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur yang statistik atau dalam bentuk hitungan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisa suatu aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, fenomena, peristiwa, dan suatu individu. Baik itu secara kelompok, ataupun individual. Teknik pengambilan informasi dalam penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi literatur atau kepustakaan dan wawancara lapangan. Namun pada penelitian ini, penulis hanya menggunakan teknik pengambilan informasi dengan cara kepustakaan.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Rutgers WPF dan Eksistensinya di Indonesia

Rutgers WPF merupakan salah satu INGO asal Belanda yang bergerak di bidang Hak dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) serta kekerasan berbasis gender dan seksual. Fokus mereka

terhadap bidang tersebut didasari oleh kepercayaan bahwa seksualitas seluruh manusia dan kesehatan reproduksi harus dilihat secara positif, tanpa adanya penilaian dan bebas dari segala bentuk kekerasan.¹⁷ Hal ini sesuai dengan Tujuan ke-5 dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dirancang oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai kesetaraan hak seluruh gender yang turut menginspirasi Rutgers WPF dalam bertindak.¹⁸

Sebagai INGO, Rutgers WPF memiliki kedudukan *consultative status* dalam *Committee on Non-Governmental Organizations* di *The United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC). Hal ini membuat Rutgers WPF dapat menyampaikan aspirasi dan rekomendasinya mengenai topik yang relevan terkait HKSR dan KBG dalam sidang PBB.¹⁹ Kesuksesan Rutgers WPF di Belanda membuat organisasi ini memperluas wilayah operasionalnya ke berbagai negara di dunia, yang kini tersebar di wilayah Eropa, Afrika, Amerika Latin dan Asia, dimana salah satunya adalah Rutgers WPF Indonesia.

Rutgers WPF di Indonesia beroperasi sejak tahun 1997. Keberadaannya resmi berstatus sebagai mitra Pemerintah Indonesia dalam menjalankan usaha pembangunan di bidang HKSR seperti perlindungan dan pencegahan KBG karena sudah terdaftar di Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia.²⁰

¹⁷ Rutgers WPF Indonesia, *Loc. Cit.*

¹⁸ Rutgers Indonesia, "Profil Rutgers WPF Indonesia," YouTube, 16 November 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=WqumgiUBEmI>.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Kementerian Luar Negeri, *Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) Di Indonesia*, (Indonesia: Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, 2011), hal. 1 <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F>

¹⁵ David Lewis dan Nazneen Kanji, *Op. Cit.*, hal. 14-16.

¹⁶ *Ibid.*

Hingga tahun 2022, Rutgers WPF Indonesia telah memperluas wilayah kerjanya ke sejumlah provinsi, yaitu Sumatera Utara dan Lampung di Pulau Sumatra; DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur di wilayah Pulau Jawa; Bali; Nusa Tenggara Barat (NTB); Sulawesi Selatan dan Papua.²¹

Rutgers WPF Indonesia memiliki visi mewujudkan generasi muda yang berdaya menuju generasi sehat, diakui, dan mendapat penghormatan atas hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas.²² Untuk mencapai visi tersebut, Rutgers WPF fokus melakukan program-program yang memiliki empat pilar utama, yaitu pengelolaan dana hibah, aksi implementasi program, penelitian dan advokasi.²³ Program-program yang telah terlaksana di Indonesia adalah Get Up Speak Out (GUSO), Yes I Do (YID), Prevention+, Explore4Action, Dance4Life dan SobatASK.²⁴

Fenomena Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KEMENPPPA) mengidentifikasi masalah kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan melanggar prinsip kesetaraan gender.²⁵ Eratnya budaya patriarki dan

[0L0RvY3VtZW50cy9CdWt1L1Nvc2JlZCUyME9JTkIvRGlyZWt0b3JpJTlwT3JnYW5pc2FzaSUyMEludGVybmFzaW9uYWwlMjBOB24tUGVtZXJpb nRhaCUyMGRpJTlwSW5kb25lc2lhLnBkZg==.](https://rutgers.id/)

²¹ Rutgers Indonesia, Rutgers Indonesia, diakses pada 8 Juni 2022, <https://rutgers.id/>.

²² Rutgers Indonesia, "Siapa Kami," Rutgers Indonesia, Terakhir disunting pada 6 Mei 2021, <https://rutgers.id/tentang-kami/siapa-kami/>.

²³ *Ibid.*

²⁴ Rutgers Indonesia, "Program Kami," Rutgers Indonesia, diakses pada 8 Juni 2022, <https://rutgers.id/tentang-kami/program-kami/>.

²⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Perlindungan Perempuan," Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diakses pada 5 Juni 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/21>.

ketidakpastian perlindungan Hukum dari pemerintah Indonesia juga melanggengkan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Ketidakpastian perlindungan hukum dan penegak hukum yang tidak memahami hukum terkait serta skema perlindungan korban membuat korban kasus kekerasan terhadap perempuan sering kali enggan melaporkan kekerasan terhadap perempuan.

Faktor Penyebab Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia

Berikut ini adalah faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang terpengaruh kondisi sosial budaya yang patriarki:²⁶

1. Ekonomi

Persaingan ekonomi yang semakin meningkat setiap tahunnya menyebabkan kondisi ekonomi semakin sulit, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Ketidakmampuan untuk mendapat sumber penghidupan yang cukup dapat memicu stres dan emosi yang berkepanjangan sehingga dapat mengakibatkan kekerasan. Terlebih lagi dengan adanya budaya patriarki yang lebih mengutamakan laki-laki untuk mencari nafkah dibanding perempuan.²⁷ Hal ini telah menempatkan perempuan pada posisi yang bergantung pada laki-laki dan rentan untuk menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dengan adanya dominasi dan ketimpangan relasi kuasa dari segi ekonomi. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang dipicu oleh permasalahan ekonomi terlihat dari kasus KDRT di Lhokseumawe, Aceh, dimana

²⁶ Fransiska N. Eleanora and Edy Supriyanto, "Violence against Women and Patriarki Culture in Indonesia," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 9 (2020): 46-47, doi:10.18415/ijmmu.v7i9.1912.

²⁷ *Ibid.*

kasus KDRT yang dilaporkan didominasi oleh permasalahan ekonomi yang kerap menimbulkan keributan dalam rumah tangga dan berujung kepada penganiayaan fisik terhadap istri. Kasus KDRT tersebut lebih banyak dialami oleh keluarga dengan tingkat ekonomi rendah dan umumnya dengan tingkat pendidikan yang sangat kurang, baik di pihak suami maupun istri.²⁸

2. Kesalahpahaman Penafsiran Agama dan Kebudayaan

Di Indonesia, langgengnya praktik budaya patriarki disebabkan oleh mengakarnya pemahaman tersebut pada budaya yang terdapat pada beragam suku yang tersebar ke seluruh Indonesia. Misalnya adalah adat dalam suku Jawa, suku mayoritas di Indonesia, dimana perempuan memiliki peran utama dalam manajemen rumah tangga dan pengasuhan, dan sosialisasi anak.²⁹ Hal tersebut sering kali diterjemahkan sebagai pembatasan peran perempuan hanya untuk mengurus kebutuhan fisik dan emosional anggota keluarga. Begitu juga dengan agama. Masyarakat di Indonesia umumnya memeluk suatu agama yang menjadi pedoman hidupnya ke hal-hal yang membawa kebaikan. Namun, terdapat individu yang tidak memahami konteks agama dengan benar, sehingga penafsiran agama olehnya dijadikan

pembenaran untuk melakukan tindakan kekerasan.³⁰ Misalnya adalah ajaran Islam, yang terdapat perintah dimana istri harus patuh terhadap suami. Hal ini kerap disalah tafsirkan sebagai membenarkan suami melakukan kekerasan untuk menegur istri, padahal sebenarnya ajaran Islam juga menjamin hak-hak perempuan dan memberikan kedudukan terhormat kepada perempuan.³¹

3. Sosial media

Sosial media dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan psikologis. Melalui berbagai sosial media seperti Facebook dan Instagram, foto atau video yang kita unggah dapat tersebar ke khalayak luas, dan kerap disalahgunakan oleh berbagai pihak yang dapat memberikan komentar seksual atau celaan di kolom komentar ataupun pesan pribadi meskipun foto atau video tersebut tidak menjerus ke hal negatif. Salah satu kasusnya adalah HA, yang menjadi korban penyebaran video pornografi oleh mantan pacar akibat adanya dendam. Hal ini berujung kepada aksi *cyber bullying* terhadap korban oleh pengguna media sosial lainnya.³²

4. Pernikahan dini

Ketidaksiapan dalam menghadapi suatu perkawinan dapat menimbulkan kekerasan yang disebabkan oleh ketidakdewasaan

²⁸ Mukhlis, "Kasus KDRT Di Lhokseumawe Didominasi Masalah Ekonomi," Antara News, diakses pada 5 Juni 2023, <https://aceh.antaranews.com/berita/28020/kasus-kdrt-di-lhokseumawe-didominasi-masalah-ekonomi>.

²⁹ Rachmah Ida, "The Construction of Gender Identity in Indonesia: Between Cultural Norms, Economic Implications, and State Formation," *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, no. 1 (January 2001): 30, <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/02-ida.pdf>.

³⁰ Eni Purwaningsih, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga (Studi di Polres Mataram)," (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2008), hal. 21, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110039/1/050801858.pdf>.

³¹ *Ibid.*

³² Atnike N. Sigi, "Internet Dan Kekerasan Terhadap Perempuan," Lokataru Foundation, diakses pada 5 Juni 2023, <https://lokataru.id/internet-dan-kekerasan-terhadap-perempuan/>.

berpikir. Hal ini juga kerap terjadi pada pernikahan dini akibat pergaulan bebas. Kekerasan terhadap perempuan akibat pernikahan dini juga kerap dirasakan oleh korban yang dipaksa menikah dengan pelaku pemerkosaan ataupun dipaksa menikah oleh orang tua untuk melunasi jeratan hutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para perempuan yang menikah pada usia anak dini beresiko tinggi mengalami KDRT dengan pelaku, yang mayoritas pasangan atau suami. Dalam kasus ini, kekerasan psikis merupakan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi, disusul dengan kekerasan fisik dan kekerasan seksual.³³

5. Kepribadian dan Kondisi Psikologis yang Tidak Stabil

Adanya semacam gangguan mental dan psikis yang dibawa oleh pelaku mengakibatkan pelaku mengalami gangguan, seperti emosi yang meledak-ledak, lekas marah, ketidakstabilan yang berujung pada kekerasan. Beberapa gejala gangguan kepribadian dan kondisi psikologis seperti adanya perubahan suasana hati yang intens, perilaku impulsif, kesulitan mengendalikan amarah, dan persepsi ekstrem terhadap orang lain (yaitu, mengidealkan seseorang pada satu saat dan membencinya pada saat berikutnya) juga dapat membuat seseorang lebih berisiko menjurus

kepada aksi kekerasan fisik atau psikologis terhadap pasangannya.³⁴

Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kekerasan terhadap Perempuan

Komitmen pemerintah Indonesia dalam melakukan penghapusan kekerasan terhadap perempuan terlihat pada tanggal 24 Juli 1984 dengan menandatangani dan meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* dengan mengimplementasikannya di dalam UU No. 7 Tahun 1984.³⁵

Selanjutnya, terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.³⁶ Pelaku kekerasan fisik juga dapat dijerat dengan pasal 351–358 KUHP atas dasar penganiayaan. Sedangkan, apabila korban perempuan berusia di bawah 18 tahun,

³³ Aristiana P. Rahayu and Waode Hamsia, "Resiko Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Pernikahan Usia Anak di Kawasan Marginal Surabaya (Studi Kasus di Kelurahan Nyamplungan, Pabon Cantikan, Surabaya)," *PEDAGOGI: Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2018), <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Pedagogi/article/view/1965/1502>.

³⁴ Mark Travers, "10 Personality Disorders That May Cause Intimate Partner Violence," *Therapytips.org - Your Guide To A Happier Future*, diakses pada 5 Juni 2023, <https://therapytips.org/interviews/10-personality-disorders-that-may-cause-intimate-partner-violence>.

³⁵ KEMENPPPA, *Violence Against Women: Domestic Violence and Human Trafficking*, (Jakarta: KEMENPPPA, 2021).

³⁶ Penny N. Utami, "Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan melalui Pusat Pelayanan Terpadu," *Jurnal Hak Asasi Manusia* 7, no. 1 (Juli 2016): 55-60, doi:10.30641/ham.2016.7.55-67.

pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002.³⁷ Selain itu, dari bidang politik, terlihat dari dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan KEMENPPPA oleh Pemerintah Indonesia yang mengakomodasi kepentingan perempuan dalam pemenuhan hak-haknya.

Meskipun begitu, instrumen-instrumen tersebut masih memberikan perlindungan terbatas bagi perempuan. Akibatnya, perempuan korban kekerasan masih rentan mengalami diskriminasi dan reviktimisasi, serta kesusahan untuk mengakses layanan dan dukungan yang mereka butuhkan. Usaha-usaha tersebut juga belum optimal karena terdapat sejumlah tantangan, yaitu adanya variasi aturan daerah, pendanaan, koordinasi antar *stakeholder* yang terlibat, sarana prasarana yang terbatas dan sumber daya manusia yang terlibat.³⁸

Dampak dari Kekerasan terhadap Perempuan

Secara langsung, dampak kekerasan terhadap perempuan adalah melanggar hak asasi manusia, mulai dari hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan, hak atas keselamatan dan keamanan, dan hak atas hidup. Secara rinci, dampak langsung yang dirasakan dapat mempengaruhi aspek kesehatan fisik, kesehatan mental, ekonomi, sosial dan perilaku korban. Berikut ini adalah penjabarannya:³⁹

1. Kesehatan fisik

Kekerasan terhadap perempuan dapat berbentuk penganiayaan yang mampu mencederai fisik korban. Contohnya adalah memar atau lebam, luka terbuka atau goresan, rasa nyeri di sejumlah bagian tubuh seperti pada sendi atau otot, penyakit kronis, tekanan darah tinggi, hingga *insomnia* atau kurang tidur. Dalam beberapa kasus, kekerasan terhadap perempuan di ranah seksual dapat meningkatkan resiko terpapar penyakit HIV dan penyakit menular seksual lainnya.

2. Kesehatan mental

Aksi kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun dapat mempengaruhi kesehatan mental penyintasnya, hal tersebut terbentuk dari pengalaman dan memori akan kekerasan yang dialami penyintas tersebut. Gangguan kesehatan mental dapat berupa malu, kehilangan rasa percaya diri, depresi, stress, trauma, mudah marah, kesepian, merasa terasingkan, merasa tak berguna atau tidak memiliki harapan untuk hidup.

3. Ekonomi

Kekerasan terhadap perempuan dapat berdampak pada kesulitan dan kendala perekonomian. Kendala tersebut dapat berupa kehilangan pekerjaan, sehingga mengakibatkan hilangnya pendapatan. Selain itu terdapat biaya perawatan kesehatan yang harus dipenuhi dan biaya lainnya yang mungkin harus dikeluarkan sehingga mempengaruhi alokasi dana yang seharusnya dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

4. Sosial

Perempuan penyintas kekerasan dapat mengalami dampak sosial, khususnya bila berada di lingkungan yang minim edukasi

³⁷ Muhammad R. Farid, "Kekerasan terhadap Perempuan: Studi terhadap Kasus-Kasus yang Ditangani oleh Rifka Annisa Woman Crisis Center Yogyakarta," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 18, no. 2 (2019), doi:10.24014/marwah.v18i2.7728

³⁸ KEMENPPPA, *Op. Cit.*, hal. 55.

³⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia* (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017), 20-21, diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/71ad6-buku-ktpa-meneg-pp-2017.pdf>.

dan pengetahuan terhadap pemahaman konsep gender dan HAM. Dampak sosial yang dirasakan dapat berupa stigmatisasi dan diskriminasi. Selain itu, perempuan korban kekerasan juga dapat merasa khawatir dan ragu-ragu untuk menjalin hubungan dengan teman atau keluarga, bahkan menjadi terisolasi dari teman-teman dan keluarganya akibat dari adanya stigmatisasi dan diskriminasi di lingkungannya.

5. Perilaku/Tingkah laku

Perilaku Korban atau penyintas kekerasan terhadap perempuan juga dapat terpengaruh akibat dari kekerasan terhadap perempuan. Adanya depresi, stress, dan beban dari lingkungan yang ia terima secara tidak disadari mampu mempengaruhi cara berpikir yang dapat menjurus untuk melakukan tindakan yang dapat mengakhiri hidupnya. Hal tersebut dapat berupa pola makan dan pola hidup yang tidak teratur, bahkan ada yang menjurus kepada penyalahgunaan alkohol dan penggunaan obat-obatan terlarang.

Selain hal-hal tersebut, kekerasan terhadap perempuan secara tidak langsung dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan suatu negara. Hal ini dapat menghambat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan sosial, sehingga menghambat pembangunan berkelanjutan dan menghambat pemberdayaan ekonomi perempuan. Kekerasan terhadap perempuan memiliki dampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan perempuan secara keseluruhan, dimana perempuan yang menjadi korban kekerasan sering mengalami luka fisik dan trauma emosional, yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka. Perempuan yang menjadi korban kekerasan seringkali tidak dapat mengakses peluang ekonomi yang adil dan setara. Pemberdayaan ekonomi perempuan

turut mengambil andil penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, karena perempuan berperan sebagai agen perubahan yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.⁴⁰

Kekerasan terhadap perempuan juga dapat menghalangi akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan. Anak perempuan yang mengalami kekerasan seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang layak, karena ada kemungkinan mereka dilarang atau merasa tidak aman untuk pergi ke sekolah. Pendidikan yang terbatas bagi perempuan menghambat potensi mereka dalam berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.⁴¹

Kekerasan terhadap perempuan memiliki dampak yang luas terhadap perdamaian dan keamanan suatu negara, dimana ketidakamanan yang diakibatkan oleh kekerasan terhadap perempuan dapat menghambat stabilitas sosial dan politik suatu negara. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan, di mana hak-hak mereka dihormati dan dilindungi agar perempuan dapat beraktivitas dengan nyaman dan setara dengan laki-laki sehingga mampu memaksimalkan potensi sumber daya manusia suatu negara.⁴²

Peran Rutgers WPF dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia melalui Program Prevention+

Prevention+ adalah program lima tahun (2016-2020), yang berfokus mengurangi dan mencegah kekerasan terhadap perempuan, serta meningkatkan

⁴⁰ INFID Admin, "Peran Penting Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan," International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), diakses pada 4 Juni 2023, <https://infid.org/news/read/peran-penting-kesetaraan-gender-dalam-pembangunan#:~:text=Kesetaraan%20gender%20pada%20suatu%20negara,baik%20laki%20laki%20maupun%20perempuan>

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

partisipasi ekonomi dan kemandirian perempuan yang berakar dari ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Selain merangkul perempuan, Prevention+ juga menjadikan laki-laki sebagai mitra yang dapat menjadi agen perubahan dalam mempromosikan maskulinitas yang sehat berdasarkan kesetaraan, pengasuhan, dan non-kekerasan.⁴³ Strategi tersebut bertujuan untuk meningkatkan program pencegahan kekerasan berbasis gender berbasis bukti dalam kemitraan strategis dengan masyarakat, lembaga publik dan organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk mencapai norma-norma gender yang positif dan setara dan untuk mengurangi laki-laki pelaku GBV.⁴⁴ Program ini memiliki konsorsium yang menjadi mitra teknis, yaitu Rutgers International, Promundo dan Sonke Gender Justice, serta *Men Engage Global* sehingga pembelajaran dari program tersebut dapat menjadi bagian dari advokasi dan dibahas di kancah internasional.⁴⁵

Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang ditangani pada program ini meliputi kekerasan fisik seperti dipukul dan ditendang; kekerasan psikologis seperti memberikan tuduhan, cacian, hingga memanipulasi korban agar merasa bersalah; dan kekerasan seksual seperti pelecehan seksual, pemaksaan kehamilan, pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi, pemaksaan aborsi, hingga perbudakan seksual dan prostitusi paksa.⁴⁶ Program ini ditargetkan dalam jangka panjang untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil gender, bebas dari KBG, dengan mengubah norma-norma sosial yang berbahaya yang mendorong KBG di tingkat individu, komunitas, dan masyarakat sipil dan memastikan bahwa perubahan ini berakar kuat dalam kerangka hukum dan kebijakan negara yang mendukung.

⁴³ Rutgers, *Op. Cit.*, hal. 11-16.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Rutgers WPF Indonesia, *Op. Cit.*

⁴⁶ *Ibid.*

Rutgers WPF dalam Program Prevention+ sebagai Pelaksana Implementer)

Pada Program Prevention+, Rutgers WPF telah melakukan berbagai aksi penyaluran atau pembentukannya suatu layanan dan fasilitas tertentu. Layanan tersebut seperti membentuk kelompok diskusi masyarakat (*community discussion group*), konseling KBG (*GBV Counselling*) dan konseling remaja (*juvenile counselling*). Layanan-layanan tersebut dirancang sedemikian rupa untuk menyentuh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari korban, pelaku, hingga kelompok dan individu yang berpotensi untuk menjadi pelaku dan korban dari kekerasan terhadap perempuan.

Kelompok diskusi masyarakat terbagi dua, yaitu yang terdiri dari anak remaja dan kelompok pasangan muda yang telah menikah. Selain bertatap muka, diskusi masyarakat juga diadakan dalam format webinar untuk menyesuaikan keadaan (Covid-19). Pada beberapa sesi, kelompok diskusi masyarakat mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait (misalnya Kementerian PPPA), yang memungkinkan mereka menampilkan beragam narasumber inspiratif yang mungkin tidak dapat diakses secara offline, yang mana salah satu sesinya sempat mengundang istri Gubernur Yogyakarta.⁴⁷ Kegiatan ini berdampak positif dalam memperbaiki komunikasi antar pasangan bagi pasangan yang sudah menikah. Meningkatnya kemampuan komunikasi tersebut membuat pasangan lebih mampu mengendalikan emosi, sehingga terhindar dari kekerasan terhadap pasangan dan anak.⁴⁸ Meskipun figur ayah masih mengontrol relasi kuasa terutama dalam pengambilan keputusan rumah tangga, terlihat adanya penerimaan nilai maskulinitas positif dengan berbagi peran dalam pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga dengan figur istri di lingkup keluarga. Diskusi komunitas yang

⁴⁷ Rutgers, *Op. Cit.*, hal. 38

⁴⁸ *Ibid.*

ditujukan pada remaja juga turut membantu membuka kesadaran dan menambah pengetahuan khususnya mengenai kekerasan (*bullying*) serta resiko dan dampak dari kekerasan terhadap perempuan. Di kelompok remaja, diskusi berjalan lebih efektif di kalangan remaja berumur 15 tahun keatas.⁴⁹

Fasilitas konseling KBG dalam Program Prevention+ turut melibatkan laki-laki dan pasangannya. Hingga tahun 2019, terdapat 399 kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan melalui konseling KBG Prevention+ yang diorganisir oleh mitra daerah. Sebanyak 213 kasus ditangani oleh Rifka Annisa dan 126 kasus ditangani oleh Damar. Evaluasi program ini menunjukkan hasil positif terhadap kasus-kasus tersebut, baik dari sisi penyintas maupun pelaku. 71.5% penyintas dan 69.4% pelaku menunjukkan adanya perubahan perilaku yang lebih baik dan mengimplementasikan keadilan gender; 65.0% penyintas dan pelaku 67.7% menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berkomunikasi yang positif dengan pasangan; 75.1% penyintas dan 62.9% pelaku menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengendalikan agresi dan frustrasi; serta 69.9% penyintas dan 50% pelaku menunjukkan adanya pengurangan tingkat kekerasan terhadap pasangan.⁵⁰

Sesi konseling ini telah membantu korban perempuan untuk memahami masalah kekerasan yang mereka alami dan membuat keputusan yang lebih baik terkait anak, perceraian dan bagaimana melindungi diri dan anak dari pasangannya. Pelaku juga merasa didukung untuk mendapatkan pengetahuan untuk memecahkan masalah dalam dirinya, mengendalikan agresi, dan membangun komunikasi yang lebih baik dengan pasangannya, atau dengan kata lain adalah perubahan perilaku. Efektivitas

konseling lebih besar dirasakan bagi kasus yang mengikutsertakan pasangannya di tahap akhir konseling guna menjembatani perbedaan antara keduanya, serta membangun komitmen hubungan yang lebih sehat antara pelaku dan korban, dengan catatan hal tersebut hanya terjadi jika korban berkeinginan untuk melakukan hal tersebut.⁵¹

Konseling remaja merupakan sesi konseling edukatif yang ditujukan bagi para remaja, termasuk remaja yang belum menjalin hubungan. Edukasi terkait kekerasan dan gender yang diterima sejak dini menjadi strategi yang optimal untuk membentuk paham masyarakat yang berkeadilan gender. Konseling remaja menggunakan modul pembinaan remaja yang dikeluarkan oleh LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) yang “*playful*” namun tetap diterapkan dengan tidak main-main.⁵² Evaluasi dari kegiatan konseling remaja menunjukkan adanya pergeseran pengetahuan tentang konsep maskulinitas, bahwa pria maskulin adalah orang yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Perubahan cara pandang oleh peserta konseling diikuti dengan komitmen untuk bertanggung jawab dan bekerja keras. Menariknya, beberapa partisipan dapat mengasosiasikan maskulinitas positif ini dengan komitmen pribadi untuk tidak menikah dini. Beberapa peserta menyadari bahwa menikah di usia dini akan menghalangi mereka untuk menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan pekerja keras.⁵³

Rutgers WPF dalam Program Prevention+ sebagai Katalis (*Catalyst*)

Sebagai katalis, Prevention+ menggunakan media sosial sebagai media komunikasi untuk menjangkau berbagai komunitas mengenai pesan-pesan dengan pendekatan transformatif gender. Hal ini ditujukan untuk menjangkau audiens yang jauh lebih besar (secara sengaja dan tidak

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Rutgers WPF, *Prevention+ End Term Review Outcome Sheet Final*, (Rutgers WPF, n.d), https://drive.google.com/file/d/1XT4iibTkRp7Gyw5iiagw_iYofQ_E6ofg/view.

⁵¹ Rutgers, *Op. Cit.*, hal. 38-39.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Prevention+ End Term Review Outcome Sheet Final, *Op. Cit.*

disengaja) yang sangat efektif untuk keterlibatan kaum muda. Di Indonesia, beberapa kampanye komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual dilakukan dengan menggunakan berbagai saluran media seperti media sosial, radio, dan poster. Anggota masyarakat yang dijangkau oleh kampanye di sekitar pesantren dan yang merasa menjadi korban kekerasan mulai angkat bicara tentang pengalaman mereka. Media sosial juga berperan penting dalam penyebarluasan informasi mengenai *hotline* untuk rujukan kekerasan berbasis gender.⁵⁴

Rutgers WPF dalam Program Prevention+ sebagai Mitra (*Partner*)

Umumnya, kemitraan dalam Program Prevention+ menghasilkan kegiatan *combining roles*, dimana kemitraan tersebut kemudian menghasilkan peranan lain yang dapat berupa implementer ataupun katalis. Untuk mengoptimalkan kinerja program Prevention+ di Indonesia, Rutgers WPF menjalin kemitraan dengan sejumlah aktor. Aktor-aktor tersebut adalah pemuka setempat (agama atau adat), polisi, Kantor Urusan Agama (KUA), jurnalis, dan NGO lokal yang ada di lokasi dimana Program Prevention+ berlangsung.

Kemitraan dengan pemuka atau pemimpin setempat diwujudkan dengan adanya pendekatan kolaboratif yang diambil saat melatih pemimpin desa dan fasilitator kelompok di Indonesia dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan membuat rujukan bagi para penyintas yang membutuhkan dukungan.⁵⁵ Prevention+ juga menggaet pemuka agama untuk mendorong komunitasnya memasukkan kontrak pernikahan yang dapat menghindari terjadinya kekerasan di dalam keluarga. Beberapa pemuka agama yang berhasil bekerja sama dengan Program Prevention+ adalah pemuka agama di Purwodadi, Lampung dan Desa Ngloro, Yogyakarta

yang telah berdiskusi dengan Rutgers WPF terkait peraturan desa yang peka terhadap kesetaraan gender dan prinsip non-kekerasan terhadap perempuan.⁵⁶

Rutgers WPF Indonesia menjalin kerja sama dalam sejumlah instansi negara dan non-negara. Instansi negara yang bekerja sama dengan Program Prevention+ adalah Kantor Urusan Agama (KUA) dan Polisi, dimana kerja sama tersebut telah membentuk *standard operating procedures* (SOPs) baru dan mencapai perubahan paradigma di dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI). SOP baru tersebut merupakan SOP untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, dimana diharuskan adanya konseling pelaku untuk memastikan pelaku telah berubah sebelum dikembalikan ke keluarganya.⁵⁷ Adanya kemitraan ini telah membuat 5 kepala KUA (4 di Yogyakarta dan 1 di Lampung) untuk mendorong pelebagaan Ikrar Anti KDRT, dan Ikrar Perkawinan/Resiprositas dalam proses akad nikah.⁵⁸ Rutgers WPF bekerja sama dengan institusi keagamaan karena pengaruh yang mereka miliki dalam hubungan suami istri dalam perkawinan; peranan tokoh agama dalam mengadopsi pendekatan gender adil yang sangat strategis dalam mencegah SGBV karena didengar oleh masyarakat, dan juga dapat menyeimbangkan konservatisme agama di masyarakat.

Selain itu, Prevention+ bermitra dengan para jurnalis dan media di Indonesia dengan mengadakan pelatihan para jurnalis dan editor dari media besar di Indonesia, pelatihan bagi para pelatih (*Training of Trainers/ToT*) institusi seperti Women's Leadership Training, Joint Father Group, dan Youth Camp Training di Indonesia.⁵⁹ Hal ini telah menghasilkan

⁵⁴ Rutgers, *Op. Cit.*, hal. 4.

⁵⁵ Rutgers, *Op. Cit.*, hal. 14.

⁵⁶ Prevention+ End Term Review Outcome Sheet Final, *Op. Cit.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

kemajuan dari cara para jurnalis melaporkan permasalahan mengenai GBV, sehingga mampu mempengaruhi norma dan perspektif masyarakat mengenai GBV.⁶⁰

Untuk memaksimalkan kinerja Program Prevention+, Rutgers WPF bermitra dengan berbagai NGO lokal yang memiliki prinsip dan tujuan yang sama. Mitra-mitra tersebut adalah Rifka Annisa, Rahima, Damar, Yabima dan Sahabat Kapas. Kelima mitra lokal tersebut turut membantu Rutgers WPF dalam Program Prevention+ dengan melakukan aksi advokasi terhadap sejumlah institusi atau komunitas lokal yang lebih terperinci dengan berbagai strategi. Seperti, Rifka Annisa berkampanye dengan strategi menggunakan bahasa daerah agar menarik dan mudah melekat di masyarakat lokal.⁶¹ Selain itu, Rifka Annisa bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam membuat *hotline* rujukan GBV yang diluncurkan sejak program Prevention+ dimulai.⁶² Rahima melakukan kampanye mengenai GBV dengan membagikan pengetahuan mengenai *Mubadalah* kedalam forum budaya untuk membongkar norma patriarki yang ada di lingkungan masyarakat.⁶³ Rahima menganjurkan dibuatnya SOP Kesalingan (saling menghormati dalam hubungan/*Mubadalah*) untuk konseling perkawinan dan pengajian dengan KUA Kulon Progo, Gunungkidul, Tanggamus dan Lampung Timur.⁶⁴ Selain itu, Rahima membuat Majalah Swara Rahima yang memuat pengetahuan *Mubadalah* tersebut. Hal ini berdampak di tingkat komunitas, khususnya komunitas santri dan pendidik di kalangan pesantren. Masyarakat sekitar pesantren mendengar informasi tentang kekerasan seksual melalui narasumber, kemudian mendatangi pesantren untuk berkonsultasi karena merasa menjadi

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*, hal. 40.

⁶² Prevention+ End Term Review Outcome Sheet Final, *Op. Cit.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Rutgers, *Op. Cit.*, hal. 44.

korban kekerasan.⁶⁵ Berbeda dengan Damar, yang menjadi mitra program dalam mengaplikasikan kegiatan diskusi komunitas, mengadakan seminar tentang permasalahan gender, penyebarluasan kampanye melalui pemasangan sejumlah poster dan penyiaran radio yang mengadopsi tema “Kesetaraan Gender” untuk menghimbau masyarakat di wilayah Pekon Purwodadi, dan menyediakan pendampingan dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan.⁶⁶ Sementara itu, Sahabat Kapas dan Yabima merupakan mitra baru yang memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan mitra-mitra sebelumnya. Yabima mengambil alih kerja diskusi komunitas yang menasar ke akar rumput, yang semula kegiatan tersebut di bawah kontrak Rutgers WPF dengan Damar. Yabima berhasil mendorong jumlah peserta diskusi komunitas karena mereka memiliki kelebihan dalam pengorganisasian komunitas. Jumlah peserta laki-laki dan perempuan pada setiap sesi diskusi juga lebih banyak dibandingkan dengan diskusi komunitas yang dilakukan oleh Damar. Sahabat Kapas juga merupakan mitra tambahan yang baik untuk Program Prevention+ ini karena mereka memiliki pengalaman melakukan konseling bagi remaja di Lapas. Sahabat Kapas juga memiliki *engagement* yang kuat dengan beberapa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia dan juga koneksi yang baik dengan Kementerian Hukum dan HAM.⁶⁷

Kendala dan Tantangan dalam Program Prevention+

Pertama, pengetahuan dan keterampilan yang relatif rendah bagi

⁶⁵ Prevention+ End Term Review Outcome Sheet Final, *Op. Cit.*

⁶⁶ Dewi M. Lena, "Implementasi Program Prevention+ Damar Lampung: Pelibatan Laki-Laki dalam Mengakhiri Kekerasan Berbasis Gender," (Skripsi, Universitas Lampung, 2019), <http://digilib.unila.ac.id/55938/2/SKRIPSI%20FUL>, [L.pdf](#). Hal. 58-79.

⁶⁷ Rutgers, *Op. Cit.*, hal. 45.

beberapa mitra implementasi utama di masa awal implementasi program. pada tahun-tahun pertama implementasi, beberapa mitra tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai mengenai desain dan pendekatan Prevention+, atau tidak dapat menemukan strategi yang efektif untuk mengontekstualisasikan berbagai elemen program. Beradaptasi dengan situasi ini menyebabkan penundaan dan pelatihan tambahan membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada yang direncanakan semula. Meskipun seiring dengan berjalannya Program Prevention+ pemahaman dan keterampilan mereka meningkat, namun akan lebih bermanfaat bagi para mitra dan akan memberikan hasil yang lebih berkualitas apabila Rutgers WPF memberikan bantuan teknis yang memadai pada tahap awal secara lebih rutin.⁶⁸

Kedua, hadirnya pandemi covid-19 dan kebijakan *social distancing* telah mengakibatkan program-program terpaksa beradaptasi dengan mengubah cara kerja di dalam maupun di luar organisasinya, dan berhadapan dengan para komunitas dan pemangku kepentingan.⁶⁹ Namun, ini menjadi kesempatan untuk membuat model program yang fleksibel dan inovatif dengan menyesuaikan cara kerja dan kegiatan dengan konteks pandemi, seperti mengalihkan aktivitas ke platform online, radio dan/atau televisi memungkinkan mitra untuk terus menjangkau audiens yang ditargetkan, atau bila terdapat urgensi bisa tetap bertatap muka dengan konsep yang lebih privat dengan mengikuti protokol Covid-19.⁷⁰

Ketiga, implementasi Program Prevention+ dituntut untuk dapat beradaptasi dengan adanya pergantian staf dan buruknya transfer pengetahuan dari staf lama ke staf baru. Hal ini berdampak pada rendahnya kapasitas pengetahuan staf pengganti yang akan bertugas, sehingga

pelaksanaan program selanjutnya tidak maksimal karena kurangnya pemahaman tentang pendekatan program dan alat/dokumen perencanaan, pelaksanaan dan teknis pelaporan. Implementasi program di mitra menjadi kurang efektif dan lambat karena program harus bekerja disaat yang bersamaan dengan proses adaptasi staf pengganti.⁷¹

Keempat, kurangnya pemahaman mitra mengenai kontekstualisasi rancangan program. Kemitraan menimbulkan munculnya jalur komunikasi baru yang membutuhkan waktu serta media atau transportasi para staf; tanggung jawab baru bagi staf tertentu; dan kebutuhan untuk berbagi informasi dengan lembaga lain. Mitra mempelajari beberapa konteks keterlibatan dan advokasi masyarakat melalui *trial and error* dalam pelaksanaan program. Meski telah ada pendampingan untuk kontekstualisasi modul, pengalaman implementasi Yabima telah menunjukkan bahwa bila hanya mengadopsi modul, tidak selalu sesuai dengan kehidupan/budaya yang ada di Indonesia. Salah satu cara untuk mengontekstualisasikan lebih lanjut adalah memanfaatkan ilustrasi dan berkaca pada studi kasus yang beresonansi dengan target audiens.⁷²

SIMPULAN

Program Prevention+ yang digagas oleh Rutgers WPF menjadi salah satu inovasi dalam mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Inovasi yang diberikan program ini diwujudkan dengan turut melibatkan laki-laki sebagai agen perubahan dalam mempromosikan nilai-nilai maskulinitas yang sehat berdasarkan kesetaraan, pengasuhan dan non-kekerasan.

Peran yang Rutgers WPF lakukan melalui Program Prevention+ di Indonesia dapat dilihat berdasarkan 3 (tiga) fungsi organisasi non-negara menurut David Lewis dan Nazneen Kanji, dimana NGO

⁶⁸ *Ibid*, hal. 20-21.

⁶⁹ *Ibid*, hal. 20.

⁷⁰ *Ibid*.

⁷¹ *Ibid*, hal. 47.

⁷² Rutgers, *Op. Cit.*, hal. 48.

memiliki tiga peranan utama, yaitu sebagai pelaksana, katalis dan mitra. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan Rutgers WPF dalam Program Prevention+, Rutgers WPF telah memenuhi ketiga peranan tersebut. Sebagai pelaksana, Rutgers WPF telah mampu menyediakan layanan dan memfasilitasi kelompok untuk menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap perempuan; kemitraan telah mempermudah proses identifikasi, pelaporan, dan pengelolaan kasus kekerasan terhadap perempuan yang lebih baik serta percepatan rujukan dan ganti rugi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di komunitas-komunitas yang terjalin; serta telah menjadi katalisator yang mampu mengedukasi dan mempromosikan urgensi penanganan kekerasan terhadap perempuan kepada berbagai pihak.

Meskipun menunjukkan keberhasilan dan peningkatan di sejumlah advokasi, penanganan dan pengedukasian korban dan pelaku, sejumlah tantangan eksternal dan internal berdampak pada keefektifan implementasi program. Meskipun begitu, peran Rutgers WPF dalam Program Prevention+ dapat dikatakan telah efektif berkontribusi dalam usaha penanganan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, serta mampu menjadi pembelajaran bagi program-program yang akan hadir kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Affiah, Neng D. *Rekam Juang Komnas Perempuan: 16 Tahun Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan*. 2014.
<https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/Rekam%20Juang%20Komnas%20Perempuan%2016%20Tahun%20Menghapus%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan.pdf>
 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di*

Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017.
<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/71ad6-buku-ktpa-meneg-pp-2017.pdf>.

Lewis, David, and Nazneen Kanji. *Non-Governmental Organizations and Development*. London: Routledge, 2009.

Usman, Husaini, and Purnomo S. Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Artikel Jurnal

Eleanora, Fransiska N., and Edy Supriyanto. "Violence against Women and Patriarchal Culture in Indonesia." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 9 (2020), 46-47.
 doi:10.18415/ijmmu.v7i9.1912.

Farid, Muhammad R. "Kekerasan terhadap Perempuan: Studi terhadap Kasus-Kasus yang Ditangani oleh Rifka Annisa Woman Crisis Center Yogyakarta." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 18, no. 2 (2019).
 doi:10.24014/marwah.v18i2.7728.

Ida, Rachmah. "The Construction of Gender Identity in Indonesia: Between Cultural Norms, Economic Implications, and State Formation." *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, no. 1 (January 2001).
<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/02-ida.pdf>.

Rahayu, Aristiana P., and Waode Hamsia. "Resiko Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Pernikahan Usia Anak di Kawasan Marginal Surabaya (Studi Kasus di Kelurahan Nyamplungan, Pabean Cantikan, Surabaya)." *PEDAGOGI: Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan*

- Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2018).
<https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Pedagogi/article/view/1965/1502>.
- Saeri, M. "Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik." *Jurnal Transnasional* 3, no. 2 (February 2012), 16.
<https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/viewFile/70/64>.
- Utami, Penny N. "Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan melalui Pusat Pelayanan Terpadu." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 7, no. 1 (n.d.).
 doi:10.30641/ham.2016.7.55-67.
- Skripsi**
- Lena, Dewi M. "Implementasi Program Prevention+ Damar Lampung: Pelibatan Laki-Laki dalam Mengakhiri Kekerasan Berbasis Gender." PhD diss., Universitas Lampung, 2019.
<http://digilib.unila.ac.id/55938/2/SKRIPSI%20FULL.pdf>.
- Purwaningsih, Eni. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga (Studi di Polres Mataram)." PhD diss., Universitas Brawijaya, 2008.
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110039/1/050801858.pdf>.
- Situs Internet**
- Asmarani, Devi. "93 Persen Penyintas Tak Laporkan Penderitaan Yang Dialami: Survei." *Magdalene.co*. Accessed August 22, 2021.
<https://magdalene.co/story/93-persen-penyintas-tak-laporkan-penderitaan-yang-dialami-survei>.
- Country Economy. "Indonesia - Global Gender Gap Index 2022." *Country Economy*. Accessed March 11, 2023.
<https://countryeconomy.com/demo-graphy/global-gender-gap-index/indonesia>.
- Indonesia, Rutgers. "Profil Rutgers WPF Indonesia." *YouTube*. November 16, 2017.
<https://www.youtube.com/watch?v=WqumgiUBEmI>.
- INFID Admin. "Peran Penting Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan." *International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)*. Accessed June 4, 2023.
<https://infid.org/news/read/peran-penting-kesetaraan-gender-dalam-pembangunan#:~:text=Kesetaraan%20gender%20pada%20suatu%20negara,bai%20laki%20laki%20maupun%20perempuan>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Perlindungan Perempuan." *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Accessed June 5, 2023.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/21>.
- Komnas Perempuan. "CATAHU 2017: Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan: Dari Gang Rape Hingga Femicide, Alarm Bagi Negara Untuk Bertindak Tepat. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016." *Perpustakaan Komnas Perempuan*. Accessed June 6, 2023.
https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4980&keywords=catahu+2017.
- Mukhlis. "Kasus KDRT Di Lhokseumawe Didominasi Masalah Ekonomi." *Antara News*. Accessed June 5, 2023.
<https://aceh.antarane.ws.com/berita/28020/kasus-kdrt-di-lhokseumawe-didominasi-masalah-ekonomi>.
- Nugroho, Indra P. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Budaya Patriarki Di Masyarakat Indonesia." *Badan Riset dan Inovasi Nasional*. Last

- modified September 29, 2022.
<https://pmb.brin.go.id/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-budaya-patriarki-di-masyarakat-indonesia/>.
- Rutgers Indonesia. "Program Kami." Rutgers Indonesia. Accessed June 8, 2022.
<https://rutgers.id/tentang-kami/program-kami/>.
- Rutgers Indonesia. "Rutgers Indonesia." Accessed June 8, 2022.
<https://rutgers.id/>.
- Rutgers Indonesia. "Siapa Kami." Rutgers Indonesia. Accessed June 8, 2022.
<https://rutgers.id/tentang-kami/siapa-kami/>.
- Rutgers WPF Indonesia. "Prevention+." Rutgers Indonesia. Accessed August 26, 2021.
<https://rutgers.id/program/prevention/>.
- Rutgers WPF Indonesia. "Siapa Kami." Rutgers Indonesia. Accessed August 26, 2021.
<https://rutgers.id/tentang-kami/siapa-kami/>.
- Sigiro, Atnike N. "Internet dan Kekerasan terhadap Perempuan." Lokataru Foundation. Accessed June 5, 2023.
<https://lokataru.id/internet-dan-kekerasan-terhadap-perempuan/>.
- Travers, Mark. "10 Personality Disorders That May Cause Intimate Partner Violence." Therapytips. n.d.
<https://therapytips.org/interviews/10-personality-disorders-that-may-cause-intimate-partner-violence>.
- Internasional Negara Berkembang Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, 2011.
<https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9CdWt1L1Nvc2J1ZCUyME9JTkIvRGlyZWt0b3JpJTIwT3JnYW5pc2FzaSUyMEludGVybmFzaW9uYWwIMjBOb24tUGVtZXJpbmRhaCUyMGRpJTIwSW5kb25lc2lhLnBkZg==>.
- Rutgers, Sonke Gender Justice, and Promundo. *Annual Report 2016 Prevention+: Men and Women Ending Gender-Based Violence*. Utrecht, 2016.
<https://aidstream.org/files/documents/Prevention-Plus-Annual-Report-2016-FINAL-20170501070516.pdf>.
- Rutgers WPF. *Prevention+ End Term Review Outcome Sheet Final*. Rutgers WPF, n.d.
https://drive.google.com/file/d/1XT4iibTkRp7Gyw5iiagw_iYofQ_E6ofg/view.

Dokumen Resmi

- KEMENPPPA. *Violence Against Women: Domestic Violence and Human Trafficking*. Jakarta: KEMENPPPA, n.d. Accessed June 5, 2023.
- Kementerian Luar Negeri. *Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) Di Indonesia*. Indonesia: Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi